



## Barang Jadul, dari 2009 Sudah Jadi Temuan BPK

Kajati Kalbar: Ini Baru Awal, Embrio



Ressi Anna Napitupulu

**PONTIANAK-RK.** Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) bukan hal baru alias Jadul. Desember tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menemukan indikasi kerugian Negara sebesar Rp21,46 miliar. Hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK di Kalimantan Barat,

■ Halaman 6

### Barang Jadul .....dari halaman 1

Mudjijono kepada DPRD Kota Pontianak yang diwakili oleh Ketua DPRD Pontianak, Hartono Azas L, dan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, pada 22 Desember 2009.

Barang lama ini baru ditindaklanjuti ketika Ressi Anna Napitupulu, SH MH, memegang jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Dia menegaskan, penggeledahan yang dilakukan pihaknya terhadap kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Pontianak memang untuk menelusuri indikasi penyimpangan dana Bansos dari tahun 2006 hingga 2008.

"Ini baru dugaan indikasi tindak pidana korupsi. Dimana dana Bansos itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukkan. Itu aja kuncinya. Ini sedang diperiksa, maka setelah penggeledahan, kita periksa berkas beserta saksi, baru kita tahu siapa yang bertanggung jawab," katanya ditemui di Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (19/2).

Ressi Anna mengaku, penggeledahan kantor BPKAD Pemkot Pontianak tersebut setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat. "Ini baru awal, embrio. Laporan ini dari masyarakat pencari keadilan. Kerugian nanti berdasarkan hasil penggeledahan hari ini," terangnya.

Namun ia belum memastikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memeriksa berkas

dugaan penyimpangan dana Bansos itu hingga diketahui siapa tersangka di balik itu. "Mengeledah itu tujuannya untuk memperoleh data dan informasi. Ini untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap perbuatan itu, jadi nggak error, kalau error impersonal susah," jelas Ressi Anna.

Untuk itu, dia melanjutkan, pemeriksaan awal dilakukan pada barang bukti hasil penggeledahan. Jika sudah cukup kuat alat bukti baru, barulah pihaknya memanggil yang bertanggung jawab terhadap anggaran pemerintah itu.

"Memiliki alat bukti yang kuat, setelah pemeriksaan saksi semua, nanti baru pemeriksaan saksi. Setelah selesai semua, baru dipanggil tersangkanya," pungkask Ressi Anna.

#### Kilas Balik Kasus,

#### Tidak Sesuai Peruntukkan

BPK perwakilan Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008 pada Pemerintah Kota Pontianak. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp21,46 miliar.

Indikasi tersebut ditemukan pada pengelolaan dana bansos Kota Pontianak terkait penggunaan dana bansos sebesar Rp16 miliar tidak sesuai dengan peruntukannya, diantaranya menimbulkan indi-

kasi kerugian daerah sebesar Rp12,5 miliar. Realisasi dana bantuan sosial tahun 2007 sebesar Rp1,7 miliar dan dana APBD lainnya sebesar Rp3,2 miliar digunakan untuk menutup pengeluaran kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (ketekoran kas).

Indikasi kerugian daerah juga ditemukan pada pemberian dana bantuan sosial tahun 2006 sampai dengan 2008 sebesar Rp2,2 miliar tidak sampai kepada penerima bantuan, realisasi belanja bansos sebesar Rp935 juta didasarkan pada proposal permohonan dana bantuan fiktif dan Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak pemain Persipon minimal sebesar Rp939,75 juta tidak dipungut dan disetor ke kas negara.

Selain temuan yang berindikasi kerugian daerah tersebut, BPK RI juga menemukan permasalahan lain, yaitu pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan sirkuit balap motor pada pengurus cabang Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Pontianak yang tidak jelas, penatausahaan dana bantuan sosial oleh KONI Kota Pontianak kurang memadai dan dana sebesar Rp8,4 miliar belum dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan.

Laporan: Ocsya Ade CP dan Andreas

Editor : Hamka Saptono